

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

ISSN : 2443-1214

Pengaruh Kemampuan, Kecakapan Dan Keterampilan Terhadap Kinerja Auditor di Kota Metro.

Agustuti Handayani

Implementasi Kebijakan Distribusi Dan Pemetaan Kualifikasi Tenaga Pendidik Di Lingkup Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang.

Azima Dimiyati

Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Ladongi Kabupaten Kolaka.

Jamal

Pengaruh Profesionalisme Dan Motivasi Kerja Terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kabupaten Tulang Bawang.

Malik

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Motivasi Terhadap Kedisiplinan Guru Sekolah Dasar (SD) Di Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara.

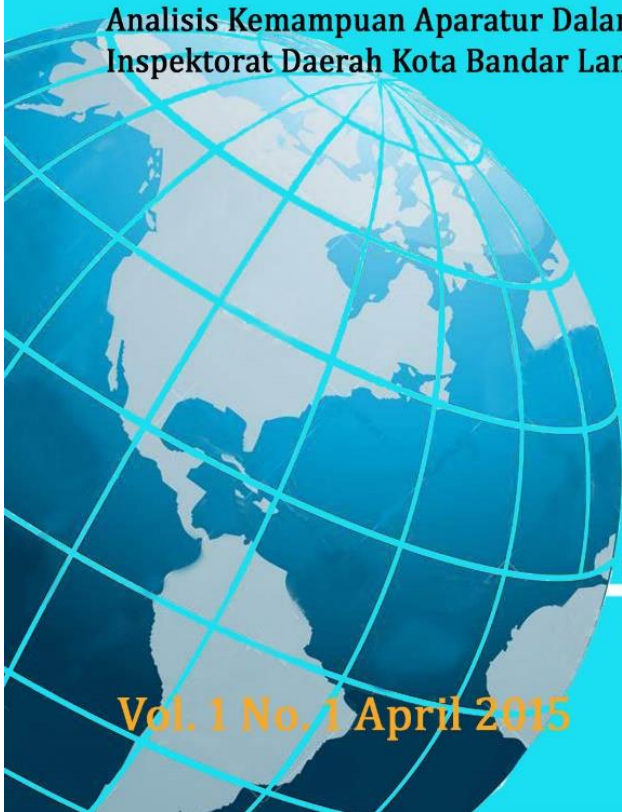
Sundi Komba

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (Bop) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Lambay, Kabupaten Kolaka Utara.

Syahri Nehru Husain

Analisis Kemampuan Aparatur Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Di Inspektorat Daerah Kota Bandar Lampung.

Yadi Lustiadi



e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 1 No. 1 April 2015

Pembina

Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA

Penanggung Jawab

Dr. Yadi Lustiadi, M.Si

Ketua Penyunting

Dr. Malik, M.Si

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Yulianto, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Supriyanto, M.Si (FISIP-UBL)

Dr. Akhmad Suharyo, M.Si (FISIP-UBL)

Dr. Nur Efendi, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Jamal, M.Si (FISIP-UHO)

Penyunting Pelaksana

Dra. Azima Dimiyati, MM

Vida Yunia Cancer, S.AN

Tata Usaha

Winda, SE

Atin Inayatin, S.AP

Penerbit

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Universitas Bandar Lampung

Alamat Redaksi

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi - UBL

Kampus B Jln. Z.A. Pagar Alam No. 89 Labuhan Ratu – Bandar Lampung 35142

Telp: (0721) 789825, Fax: (0721) 770261, E-mail: Pascasarjana@ubl.ac.id

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 1 No. 1 April 2015

DAFTAR ISI

Pengaruh Kemampuan, Kecakapan Dan Keterampilan Terhadap Kinerja Auditor di Kota Metro	1-15
Agustuti Handayani	
Implementasi Kebijakan Distribusi Dan Pemetaan Kualifikasi Tenaga Pendidik Di Lingkup Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang	16-29
Azima Dimiyati	
Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Camat Ladongi Kabupaten Kolaka	30-42
Jamal	
Pengaruh Profesionalisme Dan Motivasi Kerja Terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kabupaten Tulang Bawang	43-57
Malik	
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Motivasi Terhadap Kedisiplinan Guru Sekolah Dasar (SD) Di Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara	58-70
Sundi Komba	
Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Lambay, Kabupaten Kolaka Utara	71-87
Syahry Nehru Husain	
Analisis Kemampuan Aparatur Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Di Inspektorat Daerah Kota Bandar Lampung	88-102
Yadi Lustiadi	

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI DAN PEMETAAN KUALIFIKASI TENAGA PENDIDIK DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULANG BAWANG

OLEH:

AZIMA DIMYATI, DOSEN ADM. PUBLIK UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

ABSTRACT

Problem of this research is How implementation of policy of distribution of energy of the education and First Middle mapping kualifikasi schoolteacher this Research Type is research qualitative by using descriptive analysis qualitative. this Method use is to mendeskripsikan of implementation of policy of distribution of energy of the education and First Middle mapping kualifikasi schoolteacher in Regency of Tulang Bawang. All data obtained is direct the than field informan by using interview and obsevasi.

Result of research indicate that the implementation of policy of distribution of energy of the education and First Middle mapping membership schoolteacher in Regency of Tulang Bawang have walked, but not yet optimal of the mentioned happened by because (1) Distribution learn the Public Servant of Civil of Junior High School not yet flattened between school of exist in existing school and urban of countryside. To fill the insufficiency learn at school countryside hence side On duty Education of Young fellow and Athletics of Regency of Tulang Bawang lift the teachers assistive to fill the insufficiency learn at school countryside, but not yet answered the demand the requirement learn because a lot of teacher assistive which is only enlisted at certain school but do not run the duty. (2) Map membership learn the perbidang study not yet flattened between Junior High School of exist in urban answer the demand the amount learn the study area, while existing Junior High School of countryside not yet as required with the background of teacher education, so that still a lot of teacher of at countryside school teaching disagree with education background it.

Keyword : Energy the education, mapping, Policy

A. Pendahuluan

Investasi pendidikan sebenarnya merupakan investasi jangka panjang. Nurkholis (2002), menyebutkan tiga alasan pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Ketiga alasan tersebut adalah: *pertama*, pendidikan merupakan alat perkembangan ekonomi bukan sekedar pertumbuhan ekonomi; *kedua*, memberikan nilai balik yang tinggi; *ketiga*, memiliki banyak fungsi seperti sosial-kemanusiaan, politis, budaya, dan kependidikan. Keluaran dari pendidikan tersebut adalah sumber daya manusia yang berkualitas.

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar warga yang dapat diperoleh oleh semua warga. Untuk memenuhi hak dasar

tersebut. Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang serius sejak tahun 2000. Hal ini ditandai dengan adanya persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menetapkan anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam amandemen ke empat UUD 1945 Pasal 31.

Kewenangan daerah pada bidang pendidikan, yang menjadi urusan wajib adalah pendidikan dasar. Adanya otonomi daerah ini, telah membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dasar. Apabila hal ini didasari sepenuhnya oleh pemerintah

daerah, maka pendidikan akan membawa dampak secara langsung pada kehidupan masyarakat. Dengan demikian secara langsung bidang pendidikan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Pada penjelasan Pasal 167 UU No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa “pemerintah daerah diwajibkan melakukan peningkatan pelayanan dasar pendidikan, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 20%”.

Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu daerah otonom, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang di Provinsi Lampung, pada tanggal 7 Januari 2003. Sejak adanya perundang-undangan tersebut, Kabupaten Tulang Bawang menjadi sebuah entitas regional yang memiliki sendiri secara lengkap dengan perangkatnya dan mempunyai kewenangan otonomi untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, membawa konsekuensi bahwa Kabupaten Tulang Bawang harus menyelenggarakan kewajiban pemerintahan daerah sebagai akibat pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat.

Urusan wajib pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang sejak tahun 2008 telah diupayakan untuk membebaskan biaya pendidikan atau program pendidikan gratis untuk pendidikan dasar (SD sampai SMP). Kebijakan tersebut menjadi pertanda besarnya perhatian pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, kendala yang banyak ditemui dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di Tulang Bawang adalah menyangkut distribusi tenaga pendidik (guru) yang tidak merata di semua level pendidikan. Hal itu terkait dengan masih kurangnya tenaga guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) khususnya di perdesaan Kabupaten Tulang Bawang hampir di

semua bidang studi, sehingga kebijakan yang ditempuh oleh pemangku pendidikan di setiap sekolah adalah memberdayakan tenaga guru lepas (guru honorer), walaupun belum semua bidang studi, mempunyai guru yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, namun sudah dapat mengurangi kekurangan guru yang kapasitas dan integritasnya menjadi kendala utama. Kondisi empirik mengenai jumlah sekolah, guru dan murid untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama tahun ajaran 2009/2010 sampai dengan 2011/2012, dan yang menjadi permasalahan dalam distribusi tenaga pendidik dan kependidikan sesuai SK Bupati Nomor 110 tahun 2012 tentang pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan di Kabupaten Tulang Bawang adalah untuk memenuhi permasalahan sebagai berikut:

1. Kekurangan guru pegawai Negeri Sipil (PNS) pada daerah perdesaan, diduga merupakan salah satu penyebab kurang efektifnya pelaksanaan proses pembelajaran, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tulang Bawang.
2. Implementasi kebijakan distribusi tenaga pendidik belum sesuai perencanaan, sehingga belum merata kebutuhan guru pada sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Tulang Bawang.
3. Implementasi kebijakan pemetaan guru belum sesuai kebutuhan, sehingga kebutuhan guru pada sekolah di perdesaan belum terpenuhi, sedangkan sekolah-sekolah dipertanian kelebihan guru.

Kebijakan mengenai rencana penambahan guru perlu disesuaikan dengan rencana penambahan jumlah sekolah dan daya tampung siswa pada setiap jenjang pendidikan. Penyebaran bidang studi dan kualitas guru perlu dilakukan pengkajian dan perencanaan peningkatannya di masa mendatang. Sebagai upaya pemerataan kesempatan

mengikuti pendidikan bagi masyarakat, maka penambahan jumlah sekolah dan guru termasuk sarana belajar di wilayah pedesaan dan atau daerah terpencil perlu menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan di sektor pendidikan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Implementasi Kebijakan Distribusi Tenaga Kependidikan dan Pemetaan Kualifikasi Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tulang Bawang”.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik dan praktis, yakni:

1. Manfaat akademik

Dapat menambah pemahaman mengenai pelaksanaan pembangunan sektor pendidikan serta menambah wawasan dalam proses pembangunan bidang pendidikan. Manfaat lainnya adalah dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian lain yang menyangkut pembangunan pendidikan khususnya menyangkut implementasi kebijakan distribusi tenaga kependidikan dan kualifikasi guru lingkup Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tulang Bawang.

2. Manfaat praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam membuat kebijakan distribusi tenaga kependidikan dan kualifikasi guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tulang Bawang.

B. Kajian Pustaka

1. Implementasi Kebijakan

Masalah kebijakan (*policy*) sejak kurang lebih dua dekade terakhir, telah menarik perhatian para ahli ilmu sosial, khususnya Ilmu Politik dan Administrasi Negara, baik di negara industri maupun di negara berkembang. Masalah kebijakan dibidang pembangunan telah menarik

perhatian karena dari berbagai pengalaman di negara maju dan di negara berkembang menunjukkan bahwa berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit. Faktor tersebut antara lain berupa sumber daya manusia sampai pada struktur organisasi dan hubungan kerja antar organisasi; dari masalah komitmen para pelaksana sampai sistem pelaporan yang kurang lancar, dan dari sikap politisi yang kurang setuju sampai faktor lain yang sifatnya kebetulan.

Dalam kenyataan, hal itu dapat mempengaruhi program-program pembangunan, baik dalam arti mendorong keberhasilan maupun menjadi penyebab berbagai kegagalan atau kurang berhasilnya mencapai apa yang telah di nyatakan semula sebagai tujuan kebijakan dibandingkan dengan apa yang sesungguhnya terwujud dan diterima oleh masyarakat. Upaya untuk memahami adanya gap antara apa yang diharapkan dengan apa yang sesungguhnya terlaksana atau yang diwujudkan dan diterima oleh masyarakat sebagai “*outcome*” dari kebijakan telah menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya studi kebijakan.

Grindle (1980:67) menempatkan implementasi kebijakan sebagai suatu proses politik dan administratif. Bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Ini merupakan syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun.

Implementasi sebagai proses politik dan administratif dilihat dari sudut proses implementasi, keputusan-keputusan yang telah dibuat pada tahap rancangan atau perumusan berpengaruh terhadap lancar atau tidaknya implementasi. Hal ini kiranya akan menjadi jelas dengan mengambil contoh dampak tertentu yang

ditimbulkan terhadap implementasi dari keputusan untuk mengalokasikan sejumlah besar dana yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan kebijakan tertentu.

Perlu pula ditambahkan bahwa proses implementasi sebagian besar dipengaruhi oleh macam tujuan yang ingin dicapai dan oleh cara perumusan tujuan. Dengan demikian perumusan keputusan mungkin bahkan tidak dirumuskan sama sekali mengenai macam kebijakan yang akan ditempuh serta macam program yang akan dilaksanakan merupakan faktor-faktor yang menentukan apakah program-program tersebut akan dapat dilaksanakan dengan berhasil ataukah tidak.

Jika dikaitkan dengan masalah yang telah dirumuskan, yakni bagaimana implementasi kebijakan distribusi tenaga pendidik lingkup Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tulang Bawang serta faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam distribusi tenaga pendidik lingkup Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tulang Bawang. Diduga bahwa ada tiga faktor yang mendukung dan menghambat distribusi tenaga pendidik lingkup Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tulang Bawang, dalam setiap kebijakan publik standar dan tujuan harus senantiasa dicantumkan dengan jelas pada tiap-tiap program, agar implementasinya dapat berjalan sesuai rencana, menurut Smith (1977: 202-205), bahwa implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) *The idealized policy, that is, idealized patterns of interaction that those who have defined the policy are attempting to induce.*
- 2) *The target group, defined as those who are required to adopt new patterns of interaction by the policy. They are the people most directly affected by the policy and who must change to meet its demands.*

- 3) *The implementing organization, usually a unit of the government bureaucracy, responsible for implementation of the policy.*

- 4) *The environmental factors, those elements in the environment that influence or are influenced by the policy implementation. The general public and the various special interest groups are here.*

Smith menggunakan model teoritisnya dalam bentuk sistem di mana suatu kebijakan sedang diimplementasikan, maka interaksi di dalam dan di antara keempat faktor tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian dan akan menimbulkan tekanan atau ketegangan. Ketidaksesuaian, ketegangan dan tekanan-tekanan tersebut menghasilkan pola-pola interaksi, yaitu pola-pola tidak tetap yang berkaitan dengan tujuan dari suatu kebijakan. Pola-pola interaksi tersebut mungkin menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga tertentu, sekaligus dijadikan umpan-balik dari pola-pola transaksi dan kelembagaan.

Maksud dari unsur-unsur implementasi kebijakan tersebut adalah:

1. *The idealized policy* (kebijakan/program), dalam implementasi kebijakan salah satu aktivitas yang perlu dilakukan oleh birokrat adalah interpretasi dari kebijakan yang dianggap masih bersifat makro dan abstrak. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan yang makro abstrak yang menjadi kebijakan yang bersifat mikro dan konkrit. Dengan interpretasi ini diharapkan isi dari kebijakan tersebut dapat mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana, sehingga tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam kebijakan dapat direalisasikan secara efektif dan efisien. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan publik yang tertulis dapat dituangkan dalam bentuk peraturan dan dalam bentuk rencana. Rencana kebijakan tersebut dapat

dijabarkan secara hierarkis kedalam sejumlah program dan dari program itu disusun proyek yang kemudian dibutirkan kedalam pendanaan yang disebut anggaran (Surya wikarta, 1996:17).

2. *Target group* (kelompok sasaran) yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi baru yang dihasilkan oleh kebijakan. Adapun sampai berapa jauh mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang di implementasikan selain bergantung kepada kesesuaian isi kebijakan dengan harapan akan bergantung pula kepada karakteristik yang dimiliki oleh mereka (kelompok sasaran), sedangkan karakteristik itu sebagian dipengaruhi pula oleh lingkungan di mana mereka hidup baik lingkungan geografis maupun lingkungan sosial budaya.
3. *Implementing organization* (unsur pelaksana), menurut Smith (1977:261) yang disebut dengan "*the implementing organization*" yaitu birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, di mana organisasi ini dipandang sebagai wahana atau wadah melalui berbagai kegiatan dilaksanakan.
4. *Enviromental factors*, yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan (seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik). (Tachjan, 2006:38).

Keempat variabel tersebut, tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik. Oleh karena itu, sering menimbulkan tekanan bagi terjadinya transaksi atau tawar-menawar antara formulator dan implementor kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya, pada tahap ini monitoring dilakukan, menurut Godon (1986) dalam Keban (1999) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk realisasi program, dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program, melakukan interpretasi berkaitan dengan menterjemahkan bahasa atau istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti menggunakan instrument - instrument, melakukan pelayanan rutin, pembayaran-pembayaran atau merealisasikan tujuan-tujuan program.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994:139), didefinisikan sebagai "keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan". Sementara Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1986 : 21) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Sedangkan Wibawa (1992:5), menyatakan bahwa "implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program".

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak

hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negative effects*).

C. Metode Penelitian

Penelitian pada hakekatnya merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan menemukan jawaban atas masalah tersebut. Dalam melakukan penelitian, diperlukan metode sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga lebih memudahkan dalam pencapaian tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, berangkat dari penggalan data berupa pandangan responden, yang kemudian responden bersama peneliti memberi penafsiran sehingga menciptakan konsep sebagai temuan. Pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, terdapat pola tertentu yang penuh dengan variasi, informasi yang didapatkan harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan variasi yang ada, sehingga peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh. Dalam penelitian ini, pemecahan masalah yang akan diteliti, dilakukan dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan lapangan, dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

D. Pembahasan

Implementasi kebijakan distribusi tenaga pendidik Sekolah Menengah Pertama

(SMP) di Kabupaten Tulang Bawang, sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 9 tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang, khususnya Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah Raga, maka penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan lingkup SKPD Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tulang Bawang, telah berjalan sebagaimana penjabaran peraturan tersebut, namun belum optimal.

Kemudian tingkat perbandingan antara jumlah sekolah dan jumlah guru pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2012 walaupun terjadi penambahan jumlah guru, namun masih belum mencukupi terhadap sekolah-sekolah yang ada dipelosok perdesaan yaitu rata-rata satu sekolah terdiri dari 14 (empat belas) orang guru SMP, namun kenyataannya bahwa rata-rata 1 (satu) sekolah menengah pertama (SMP) yang ada di perkotaan terdiri antara 40 empat puluh sampai 45 (empat puluh lima) guru sedangkan sekolah-sekolah yang ada pada daerah perdesaan satu sekolah hanya terdiri antara 6 sampai 7 orang guru, untuk mengatasi hal tersebut maka pada sekolah-sekolah yang kekuarang guru baik guru PNS maupun guru honorer maka ada guru yang mengajar untuk beberapa mata pelajaran, yang ada dipelosok perdesaan, hal inilah yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak Dinas pendidikan pemuda dan olahraga dalam mendistribusikan guru-guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tulang Bawang.

Sesuai hasil penelitian bahwa sampai dengan 2013 mengalami peningkatan baik dari dari jumlah siswanya maupun jumlah tenaga pendidik yang terus bertambah setiap tahunnya, penambahan tenaga pengajar tersebut yaitu untuk mengimbangi rasio siswa yang setiap tahunnya bertambah sehingga untuk meningkatkan

kualitas pendidikan maka guru juga harus ditambah sehingga kualitas pembejalaran dapat terwujud.

Kemudian dalam pemetaan kebutuhan tenaga pendidik di Kabupaten Tulang Bawang perlu mendapat perhatian yang serius dari pihak Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang, agar sekolah-sekolah yang ada perdesaan dapat terpenuhi, sehingga out put kualitas sumber daya manusia yang diharapkan tercapai sesuai rencana.

Jika dikaitkan dengan masalah yang telah dirumuskan, yakni bagaimana implementasi kebijakan distribusi tenaga pendidik lingkup Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tulang Bawang serta faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam distribusi tenaga pendidik lingkup Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tulang Bawang. Diduga bahwa ada tiga faktor yang mendukung dan menghambat distribusi tenaga pendidik lingkup Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tulang Bawang, dalam setiap kebijakan publik standar dan tujuan harus senantiasa dicantumkan dengan jelas pada tiap-tiap program, agar implementasinya dapat berjalan sesuai rencana, menurut Smith (1977: 202-205), bahwa implementasi kebijakan terdiri dari :

- 1) *The idealized policy, that is, idealized patterns of interaction that those who have defined the policy are attempting to induce.*
- 2) *The target group, defined as those who are required to adopt new patterns of interaction by the policy. They are the people most directly affected by the policy and who must change to meet ist demands.*
- 3) *The implementing organization, usually a unit of the government bureaucracy, responsible for implementation of the policy.*

4) *The environmental factors, those elements in the environment that influence or are influenced by the policy implementation. The general public and the various special interest groups are here.*

Keempat variabel tersebut, tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu sering menimbulkan tekanan bagi terjadinya transaksi atau tawar-menawar antara formulator dan implementor kebijakan.

Dengan demikian bahwa menyangkut pemetaan dan pendistribusian guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang, namun belum optimal karena berbagai permasalahan yang timbul setelah pendistribusian tenaga pendidik tersebut, untuk beberapa saat guru-guru yang ditugaskan pada daerah-daerah perdesaan banyak yang minta untuk pindah diperkotaan dengan berbagai alasan dan pada umumnya yang pindah adalah guru-guru perempuan dengan alasan ikut suami. Sehingga sekarang masih diupayakan agar tenaga-tenaga pendidik yang berasal dari daerah di mana sekolah tersebut berada untuk dididik dan ditugaskan pada daerah tersebut, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga pendidik utamanya pada daerah perdesaan.

Hal tersebut didukung pendapat Godon (1986) dalam Keban (1999) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk realisasi program, dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program, melakukan interpretasi berkaitan dengan menterjemahkan bahasa atau istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk yang dapat diterima

dan feasible. Menerapkan berarti menggunakan instrument-instrument, melakukan pelayanan rutin, pembayaran-pembayaran atau merealisasikan tujuan-tujuan program.

Tingkat penyebaran informasi tentang pendidikan berlangsung pada Dinas Kabupaten Tulang Bawang yang membawahi proses pendidikan. Hal ini berada pada areal tataran penguasaan dan penyebaran informasi yang modern, namun masih pada tingkat yang sedang. Artinya, masih ada informasi yang seharusnya disampaikan secara cepat oleh pelaku kepada masyarakat, namun tidak dilakukan atau dilakukan dengan cara yang sangat lambat, sehingga isi informasi itu tidak dapat ditindak lanjuti. Masalahnya penyempaian tentang penerimaan murid baru melalui radio atau koran, Penyebaran informasi lebih baik pada organisasi struktural bila dibanding di sekolah. Perbedaan seperti ini sangat mencolok pada komunitas baru berkembang, hal ini antara lain disebabkan oleh organisasi struktural di komunitas ini telah mendapatkan manfaat dari penggunaan *e-government*, sementara manfaatnya di sekolah relatif masih sangat sedikit. Memang telah ada segelintir anggota organisasi yang memahami makna *e-government*, tetapi masih bersifat individual manfaatnya.

Rasio murid terhadap sekolah disamping menyatakan tingkat efisiensi penggunaan/pengelolaan sekolah, juga menggambarkan kecukupan sarana pendidikan. Pada tahun 2011, rasio murid terhadap sekolah tingkat SMP yaitu 281,86. Dapat diartikan bahwa pendayagunaan sekolah SMP lebih maksimal.

Sesuai hasil penelitian bahwa tingkat pembangunan sumber daya manusia pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, bahwa Kabupaten Tulang Bawang perkembangan pendidikan cukup memadai, namun demikian tidak diimbangi dengan perkembangan guru yang ada, sehingga

rasio antara murid dan guru cukup tinggi, namun demikian bahwa cukup disyukuri bahwa partisipasi masyarakat untuk mendukung pendidikan cukup tinggi dengan kesadaran menyekolahkan anak-anak mereka pada tingkat sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) walaupun orang tua kurang mampu, sedangkan tingkat perkembangan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang masih relatif rendah, hal tersebut terlihat bahwa rasio murid dan guru yang relatif rendah kemudian perkembangan pendidikan yang juga relatif lambat hal tersebut terjadi karena masih banyak usia sekolah dasar di Kabupaten Tulang Bawang yang belum bersekolah.

Sesuai hasil penelitian bahwa perbandingan antara jumlah sekolah, jumlah guru, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tulang Bawang, 1:14. Artinya kalau dirata-ratakan satu sekolah mempunyai guru empat belas orang. Hal tersebut memperlihatkan bahwa satu sekolah masih mempunyai perbandingan yang cukup baik terhadap jumlah guru, namun kenyataannya setelah pendistribusian ternyata kurang berimbang antara sekolah yang ada di perkotaan dan sekolah yang ada diperdesaan, kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah murid masih dalam tahap yang seimbang bila dibandingkan dengan jumlah guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kabupaten Tulang Bawang.

Berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan guru PNS dan guru bantu sementara (GBS), yang secara tidak langsung terkait dengan upaya penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun, pada tahun 2011 juga mendapat perhatian dari Pemerintah Pemuda dan olahraga Kabupaten Tulang Bawang dengan alokasi anggaran sebesar 17,9 milyar rupiah yang diberikan kepada 1.721 guru PNS dan kepada 80 guru honorer Sekolah Menengah Pertama (SMP) di daerah terpencil yang ada di Kabupaten Tulang Bawang.

Implementasi kebijakan distribusi tenaga pendidik Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tulang Bawang, sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 9 tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang, khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, maka penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan lingkup SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tulang Bawang, telah berjalan sebagaimana penjabaran peraturan tersebut, namun belum optimal, hal tersebut karena berbagai kendala, untuk mengetahui hal tersebut maka dikemukakan tahapan-tahapan pelaksanaan sesuai teori yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. *The idealized policy* (kebijakan/program)

Paradigma pembangunan yang berkembang pada tahun 90-an yaitu paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*human centered development*). Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran praktis peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan.

Dengan demikian sekurangnya ada dua sektor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup layak yaitu pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik tersebut maka akan Meningkatkan pula produktivitas penduduk. Peningkatan

produktivitas ini, pada gilirannya mampu meningkatkan pembangunan manusia yang selanjutnya dengan sendirinya berdampak pada penurunan angka kemiskinan, hal tersebut terlihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan dari 2007 sampai dengan 2013 nampak Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan IPM yang cukup signifikan dengan usaha pemerintah dalam pembangunan IPM di Kabupaten Tulang Bawang. Dengan demikian bahwa pengeluaran di sektor publik sangat bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan manusia dan mengurangi penduduk miskin.

Sehubungan dengan itu maka agar kebijakan distribusitenaga pendidik dan pemetaan guru efektif dan sinergis diterapkan perlu ada tahapan analisis program yang dapat dijadikan standar monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, walaupun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang sudah menganalisis melalui pendekatan SWOT analysis, sehingga kebutuhan guru ini jauh terkesan dari anggapan sebagai program penyelamatan terhadap guru-guru yang masih honorer, yang sebagian kalangan menilai dalam rangka “kepentingan politis”. Melalui tahapan analisis program ini akan mengeliminasi anggapan yang negatif dan akan memudahkan pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang untuk memonitor dan mengevaluasi sejauh mana kinerja sekolah dalam menjalankan programnya.

2. *Target group* (kelompok sasaran)

Salah satu cermin pemerataan akses pendidikan dasar, dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Dengan melihat APS usia SD (7-12) pada tahun 2011 yang mencapai 98,37, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh anak usia 7-12 tahun telah menikmati pendidikan dasar.

Rasio murid terhadap sekolah

disamping menyatakan tingkat efisiensi penggunaan/pengelolaan sekolah, juga menggambarkan kecukupan sarana pendidikan. Pada tahun 2011, rasio murid terhadap sekolah tingkat SMP yaitu 281,86. Dapat diartikan bahwa pendayagunaan sekolah SMP lebih maksimal.

Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang ditujukan untuk memperluas pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Pemberdayaan penduduk ini dapat dicapai melalui upaya yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatkan derajat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan produktif, sosial, budaya dan politik. Upaya untuk mengangkat manusia sebagai tujuan utama pembangunan, sebenarnya telah muncul dengan lahirnya konsep "basic need development".

Sesuai hasil penelitian bahwa tingkat pembangunan sumber daya manusia pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, bahwa Kabupaten Tulang Bawang perkembangan pendidikan cukup memadai, namun demikian tidak diimbangi dengan perkembangan guru yang ada, sehingga rasio antara murid dan guru cukup tinggi, namun demikian bahwa cukup disyukuri bahwa partisipasi masyarakat untuk mendukung pendidikan cukup tinggi dengan kesadaran menyekolahkan anak-anak mereka pada tingkat sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) walaupun orang tua kurang mampu, sedangkan tingkat perkembangan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang masih relatif rendah, hal tersebut terlihat bahwa rasio murid dan guru yang relatif rendah kemudian perkembangan pendidikan yang juga relatif lambat hal tersebut terjadi karena masih banyak usia sekolah dasar di Kabupaten Tulang Bawang yang belum bersekolah.

3. *Implementing organization* (unsur pelaksana)

Pebandingan antara jumlah sekolah, jumlah guru dan murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada masing-masing sekolah di Kabupaten Tulang Bawang, nampak bahwa ratio perbandingan tersebut cukup baik. Hal tersebut memperlihatkan bahwa, baik jumlah murid cukup berimbang pada tingkatan sekolah, namun kalau dilihat dari jumlah rata-rata murid dalam satu sekolah sangatlah banyak, kemudian rasio antara guru dan murid pada sekolah luar kota dengan sekolah dalam kota yang relatif masih tinggi, hal tersebut memperlihatkan relatif kurangnya guru-guru negeri atau guru yang berstatus pegawai negeri sipil di Kabupaten Tulang Bawang. Relatif memadai hanya kebanyakan tinggal di Kota sehingga nampak bahwa sekolah yang ada di kota gurunya relatif memadai sedangkan sekolah yang ada diperdesaan relatif sedikit gurunya.

4. *Enviromental factors*, (unsur-unsur didalam lingkungan)

Implementasi kebijakan distribusi tenaga pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang yang cenderung pada kategori tinggi sebagaimana disebutkan memperkuat pernyataan teoretik Van Meter and Van Horn (1975:464). Pemerintah selaku pembuat kebijakan telah menyatakan standar dan tujuan yang jelas. Namun demikian, dimasukkannya standar-standar normatif dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2006 yang tidak terkait langsung dengan muatan Inpres Nomor 5 Tahun 2006, mencerminkan apa yang disinyalir oleh Van Meter and Van Horn (1975:464) sebagai kesengajaan menggulirkan standar dan tujuan yang mendua arti dan kontradiktif. Permendiknas Nomor 35 Tahun 2006 menggulirkan standar lulusan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, standar sarana pendidikan, standar prasarana pendidikan,

standar persentase sekolah yang harus memiliki perpustakaan, dan standar persentase sekolah yang menjalankan MBS. Standar-standar normatif tersebut bukan merupakan penjabaran atau norma pelaksanaan dan penuntasan pencapaian angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar sebagai tujuan Inpres Nomor 5 tahun 2006.

Pengguliran standar normatif yang kontradiktif ini membuat rumit pengarahan peran dari semua personil yang terlibat dalam implementasinya serta mengaburkan basis pengukuran keberhasilan implementasinya.

Dalam implementasi kebijakan distribusi tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tulang Bawang akan sangat bervariasi karena permasalahan dan potensi (karakter) yang dimiliki di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang. Untuk daerah yang terpencil seperti beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, memiliki sumber daya alam potensial tetapi sering dihadapkan pada kendala infrastruktur yang tidak memadai. Banyak program-program yang sejenis telah digulirkan oleh pemerintah pada sekolah-sekolah dipelosok, tetapi dalam implementasi dan target yang harus dicapai kadang-kadang tidak dapat diserap bahkan salah sasaran. Hal ini disebabkan dari tidak mampunya sumber daya manusia sebagai pelaksana program dan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi program.

Deskripsi tentang distribusi tenaga kependidikan, dalam pelaksanaan pendidikan khususnya di Kabupaten Tulang Bawang telah dilaksanakan, karena semua bidang pendidikan telah tersedia guru yang sesuai, walaupun masih ada guru yang merangkap bidang studi dalam memberikan mata pelajaran pada seskolah-sekolah yang jauh dari pusat Kota karena keterbatasan jumlah guru yang ada,

demikian juga menyangkut volume kerja, meskipun tetap didasarkan dari pemikiran bahwa pembahasan kedua indikator ini tidak dapat dipisahkan secara tegas, karena pembagian kerja melahirkan volume kerja di dalam suatu unit organisasi, namun karena keterbatasan jumlah guru maka sebagian besar guru merangkap mata pelajaran dalam memberikan materi, hal tersebut mengakibatkan kurang optimalnya kegiatan belajar mengajar khususnya pada daerah-daerah perdesaan yang jauh dari pusat Kota pada Kabupaten Tulang Bawang.

Dengan demikian bahwa implementasi kebijakan distribusi tenaga kependidikan dan pemetaan guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tulang Bawang telah dilaksanakan namun belum sesuai yang diharapkan karena belum berjalan sebagaimana mestinya, sebab masih selalu memperhatikan metode balas jasa baik dalam pengangkatan guru maupun dalam penempatannya. Sedangkan pendistribusian tenaga administrasi sudah mencukupi baik sekolah yang ada di perkotaan maupun sekolah yang ada diperdeasaan, sehingga tenaga administrasi tidak terjadi permasalahan dalam pendistribusiannya.

E. Simpulan dan Saran

a. Simpulan

1. Implementasi kebijakan distribusi tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tulang Bawang telah dilaksanakan, namun belum optimal hal tersebut karena pendistribusian yang belum merata antara sekolah yang ada di Perkotaan dan sekolah yang ada diperdeasaan. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di perkotaan pendistribusian guru pada umumnya sudah mencukupi sesuai kebutuhan, sedangkan pendistribusian guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada diperdeasaan pada

umumnya relatif kurang, untuk memenuhi kekurangan tersebut maka pihak Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga mengangkat guru-guru honorer untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

2. Pemetaan kualifikasi guru pada masing-masing bidang studi untuk sekolah-sekolah yang ada dipertanian pada umumnya sudah tercukupi dan bahkan ada Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang jumlah guru pada mata pelajaran Bahasa Indonesia relatif banyak gurunya, sehingga tidak mencukupi jam pengajaran untuk syarat sertifikasi, untuk mencukupi syarat tersebut maka guru-guru tersebut mengajar untuk bidang studi yang bukan keahlian mereka dengan tujuan untuk mencukupi syarat sertifikasi tersebut, sedangkan sekolah yang ada dipertanian pada umumnya kekurangan guru bidang studi IPA, sehingga guru-guru yang ada mengajar bukan bidang keahlian mereka dengan jam yang relatif melebihi dari jam yang ditentukan sebagai syarat sertifikasi guru.

b. Saran-saran

1. Untuk mensukseskan implementasi kebijakan distribusi tenaga pendidik Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tulang Bawang, perlu pembinaan secara terus menerus kepada tenaga yang bertugas dalam merencanakan dan mendistribusikan tenaga kependidikan.
2. Mengingat kualitas sumber daya manusia (SDM) di pertanian belum siap maka diharapkan pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana terhadap daerah pertanian, untuk memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa yang berprestasi untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berasal dari pertanian, sehingga sekolah-sekolah yang kurang

tenaga pendidiknya dapat terpenuhi pada masa-masa mendatang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sekolah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi .
- Darwin. 1998. *Pokok-pokok Organisasi dan Asas-asas Manajemen*. Yogyakarta ; Liberty.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. LP3ES. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Alih Bahasa: Muhadjir Darwin. Yogyakarta ; Hamindita Offset.
- Dye, Thomas R. 1987. *Understanding Public Policy*. New Jersey ; Prentice Hall, Inc.
- Edwards III, George, C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc. Washington D.C.
- Grindle, Merilee, 1980. *Politics And Policy Implementation In The Third World*, New Jersey ; Princeton University Press.
- Hogwood, BW., and LA., Gunn. 1984. *Policy Analysis for the Real World*; New York ; Oxford University Press.

- Hoogerwerf, A. 1978. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta ; Penerbit Erlangga.
- Islamy, Irfan, 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta ; Bumi Aksara.
- Parasuraman, Zeithaml Berry. 1988. *ServQual: A Multiple-Item Scale For Measuring Consumer Perception Of Service Quality*, Journal of retailing.
- Rondinelli, A. Dennis, 1990. *Proyek Pengembangan Sebagai Manajemen Terpadu, Pendekatan Adaptif Terhadap Administrasi Pembangunan*, Terjemahan, Sahat Simamora. Jakarta ; Bumi Aksara.
- Sabatier, Paul A. And Hank Jenskins-Smith (eds) 1993, *Policy Change and Earning an Advocacy Coalition Approach Bonlder CO. West View Press*.
- Salim, 1998. *Faktor Manusia dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta ; Akademika Pressindo,
- Siagian, Sondang P. 1994. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta ; Haji Masagung.
- Smith, B.C. 1977. *Policy Making in British Government*. London ; Martin Robertson.
- Soekirman. 1992. *Kemiskinan dan Kesejangan Sosial*. Jakarta ; Gunung Agung.
- Soenarko. 2000. *Publik Policy; Pengertian Pokok-Pokok Untuk Memahami dan Analisis Kebijakan Pemerintahan*. Surabaya ; Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung ; Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung ; Alfa Beta.
- Suryawikarta. 1996. *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta ; Gramedia.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung ; Puslit KP2W Lemnit Unpad.
- Tjokroamidjojo, Bintoro dan AR. Mustopadidjaja. 1991. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan : Perkembangan Teori dan Penerapan*. Jakarta ; Masagung.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1976. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Jakarta ; Pustaka Pelajar.
- Thompson, Dennis F. 2000. *Etika Politik Pejabat Negara*. Yayasan Obor Indo.
- Van Horn, Carl & Van Meter. 1981. *Policy Implementation In The Federal System*. Lexington ; Mass.
- Wahab, Solihin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta ; Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta ; Intermedia.

Wibawa, et.al. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta ; Raja Grafindo Persada.

William, J. Clifton. 1978. *Human Behavior in Organization*. Ohio ; South Western Publishing.

Wildavsky, Aaron. 1980. *How To Limit Government Spending*. Berkeley ; *University of California press*.